

2022



BPMP PROVINSI BENGKULU
KEMDIKBUDRISTEK

RENCANA STRATEGIS

BPMP PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020 - 2024
EDISI REVISI KE 2 TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Bengkulu, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut merujuk kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2020-2024 dan merupakan bahan perumusan Rencana Strategis BPMP Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024.

Rencana Strategis sebagai dokumen utama yang memuat visi, misi, kebijakan, tujuan strategis, sasaran program dan indikator kinerja program (IKP) pembangunan bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, menjadi salah satu pedoman pelaksanaan kinerja organisasi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selain itu, Rencana Strategis ini lebih lanjut dijabarkan ke dalam rencana kinerja atau program kerja tahunan yang sekaligus juga menjadi rujukan untuk mengevaluasi capaian program dan kegiatan dalam periode lima tahunan.

Renstra Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 menjadi acuan BPMP Provinsi Bengkulu dalam memastikan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Bengkulu untuk lima tahun kedepan.

Bengkulu, Agustus 2022
Kepala BPMP Provinsi Bengkulu,

Dra. Widyati Rosira, M.Pd.
NIP. 496805091993032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kondisi Umum Mutu Pendidikan di Provinsi Bengkulu.....	4
C. Issu Strategis.....	7
D. Potensi dan Permasalahan.....	8
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	11
A. Visi.....	11
B. Misi.....	16
C. Tujuan Startegis.....	17
D. Sasaran Strategis.....	17
E. Tata Nilai BPMP Provinsi Bengkulu.....	18
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	24
A. Arah Kebijakan dan Strategi.....	24
B. Kerangka Regulasi.....	27
C. Kerangka Kelembagaan.....	29
D. Reformasi Birokrasi.....	30
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	32
A. Target Kinerja.....	32
B. Defisini Operasional dan Metode Pengukuran.....	33
C. Kerangka Pendanaan.....	38
BAB V. PENUTUP.....	41
LAMPIRAN.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan cita-cita yang diharapkan dari pembangunan pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, maka Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen) harus mengelola kesinambungan dari upaya-upaya pembangunan yang telah, sedang dan akan dilakukan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan urusan konkuren, yaitu urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Untuk itu, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen perlu menerjemahkan upaya-upaya tersebut dalam dokumen kebijakan jangka menengah, yakni dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dokumen Renstra Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dimaksud akan menjadi haluan bagi strategi pembangunan pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen baik bagi 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Dokumen Renstra Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Tahun 2020-2024 merupakan penyempurnaan dan penyesuaian untuk menyikapi restrukturisasi fungsi pada Kemdikbudristek. Selain untuk menjabarkan tugas dan kewenangan baru tersebut, penyempurnaan Renstra juga dilakukan untuk mempertajam strategi dan upaya-upaya dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 yang merebak di awal tahun 2020 telah menyebabkan ±60 juta anak usia sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran secara optimal di sekolah. Maka, perubahan Renstra ini juga akan membawa upaya-upaya menekan dampak turunnya kualitas belajar peserta didik yang disebabkan proses belajar mengajar yang tidak optimal selama pandemi. Upaya ini akan dilakukan salah satunya dengan melakukan akselerasi transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan ini diharapkan membuka kesempatan bagi semua satuan pendidikan, guru dan peserta didik dapat secara mandiri melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.

Dalam upaya penguatan jaminan kualitas pendidikan dan meningkatkan kapasitas daerah, pemberdayaan BPMP Provinsi sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan sangat penting untuk dilakukan. Berbagai permasalahan di tingkat satuan pendidikan menengah; pelaksanaan kurikulum, proses pembelajaran di kelas, kerjasama guru, siswa, orang tua, dan masyarakat lainnya perlu ditumbuhkan melalui lembaga yang berkompeten dalam melakukan pengendalian mutu untuk menuju lembaga sekolah yang kredibel. Pembinaan terhadap BPMP Provinsi dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia sehingga dapat mengemban tugas baru yang menjadi tanggungjawabnya. Pemetaan mutu sekolah dan melihat efektivitas sekolah dapat dijadikan sebagai masukan dalam memberikan intervensi kepada satuan pendidikan dalam menyongsong masyarakat ekonomi asia dan meningkatkan daya saing regional.

BPMP Provinsi memiliki tugas untuk mengawal keberhasilan pemerintah dalam membangun sektor pendidikan terutama dalam pemenuhan standar nasional pendidikan. Kegiatan ini diharapkan memberikan profil satuan pendidikan pada masing-masing daerah terhadap pemenuhan 8 standar pendidikan. Fasilitasi pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) perlu dilakukan agar arah peningkatan kualitas pendidikan dan layanan pendidikan tidak menyimpang dari target tersebut.

B. Kondisi Umum Mutu Pendidikan di Provinsi Bengkulu

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bengkulu sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di daerah telah melaksanakan kegiatan dalam upaya mendukung rencana strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang saat ini telah berubah menjadi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

1. Data Satuan Pendidikan di Provinsi Bengkulu

Berikut data jumlah satuan pendidikan (TK, SD, SMP, SMA dan SLB) yang ada di Provinsi Bengkulu :

Tabel 1. Data Satuan Pendidikan di Provinsi Bengkulu (Agustus 2022)

No	Wilayah	JUMLAH		TK		SD		SMP		SMA		SLB	
		N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S
1	Kota Bengkulu	127	323	4	252	81	31	25	23	12	15	5	2
2	Kab. Bengkulu Utara	325	119	10	100	228	11	70	5	16	3	1	0
3	Kab. Seluma	239	156	1	147	180	6	47	1	10	2	1	0
4	Kab. Bengkulu Selatan	178	55	21	42	115	5	30	4	11	4	1	0
5	Kab. Kaur	195	177	18	162	129	8	36	4	11	3	1	0
6	Kab. Muko-muko	207	191	16	163	126	13	47	11	16	3	2	1
7	Kab. Rejang Lebong	244	64	14	27	171	20	44	13	14	4	1	0
8	Kab. Lebong	122	50	5	41	88	5	23	3	5	1	1	0
9	Kab. Bengkulu Tengah	134	32	2	27	92	1	32	2	7	2	1	0
10	Kab. Kepahiang	133	98	5	86	93	9	27	2	7	1	1	0
	Total	1.904	1.265	96	1.047	1.303	109	381	68	109	38	15	3

Sumber: Dapodikdasmen Per Agustus 2022

2. Gambaran Umum Capaian SNP (Standar Nasional Pendidikan)

Gambaran Umum Capaian SNP pada Jenjang SD, SMP, dan SMA di Provinsi Bengkulu tahun 2016, 2017 dan 2018 sebagai berikut:

JENJANG SD

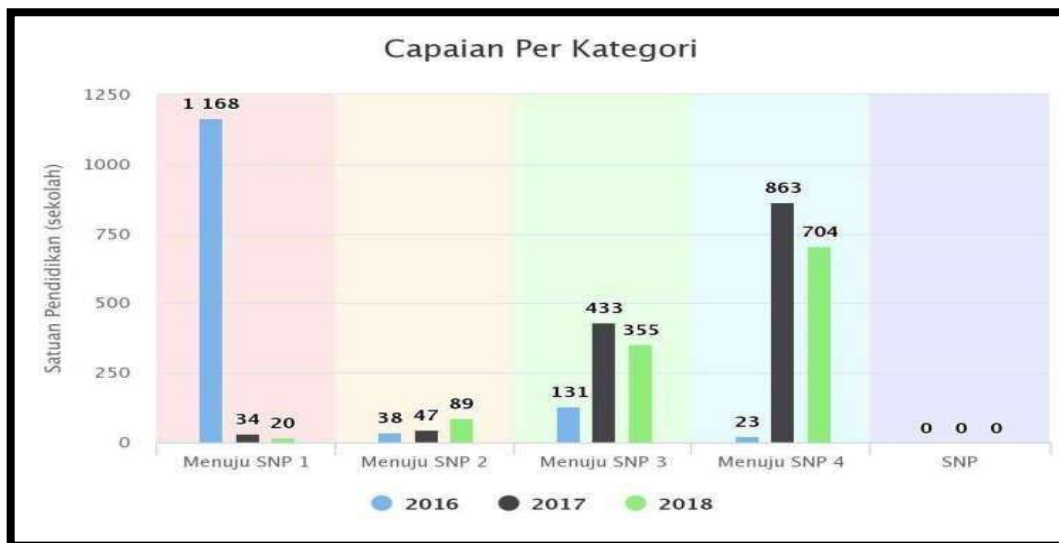
Peta capaian mutu jenjang SD 3 (tiga) tahun terakhir (2016, 2017, 2018) di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Peta capaian mutu jenjang SD 3 (tiga) tahun terakhir (2016, 2017, 2018)

Capaian SNP			
Category	2016	2017	2018
Standar Kompetensi Lulusan	3.83	5.75	5.64
Standar Isi	4.41	5.21	4.66
Standar Proses	4.56	6.08	5.84
Standar Penilaian Pendidikan	3.83	5.52	5.26
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.47	3.93	4.06
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.63	4.04	4.81
Standar Pengelolaan Pendidikan	3.95	5.26	4.54
Standar Pembiayaan	3.53	5.5	5.5

Sumber: *pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id*

Grafik 1. Perbandingan Capaian SNP Satuan Pendidikan SD Provinsi Bengkulu tahun 2016, 2017 dan 2018:



Secara umum capaian mutu SNP jenjang SD di 10 kabupaten/kota pada tahun 2018 meningkat dari 2 (dua) tahun sebelumnya, umumnya sudah "menuju SNP 4" terdapat 704 sekolah atau sebesar 51,80 % dari 1168 Sekolah Dasar yang diolah datanya di provinsi Bengkulu. Sementara itu 355 Sekolah atau sebesar 26,12 % sekolah capaian SNP nya "menuju SNP 3", 89 sekolah atau sebesar 6,55 % sekolah menuju SNP 2, sementara masih tersisa 20 sekolah atau 1,47% capaian SNP nya "menuju SNP 1". Dari Sekolah Dasar yang ada di Provinsi Bengkulu belum ada sekolah yang capaian memenuhi SNP.

JENJANG SMP

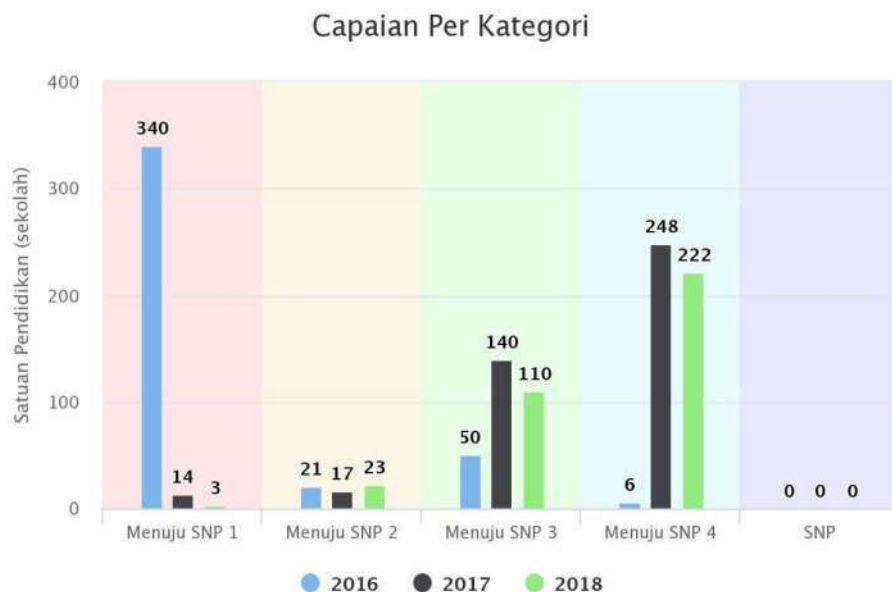
Peta capaian mutu jenjang SMP 3 (tiga) tahun terakhir (2016, 2017, 2018) di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Peta capaian mutu jenjang SMP 3 (tiga) tahun terakhir (2016, 2017, 2018)

Capaian SNP			
Category	2016	2017	2018
Standar Kompetensi Lulusan	4.26	5.57	5.83
Standar Isi	4.38	5.13	4.84
Standar Proses	4.64	5.94	5.9
Standar Penilaian Pendidikan	3.79	5.4	5.36
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.36	4.24	3.57
Standar Sarana dan Prasarana Kependidikan	4.56	4.05	4.95
Standar Pengelolaan Pendidikan	4,00	5.15	4.6
Standar Pembiayaan	3.6	5.44	5.57

Sumber: *pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id*

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui perbandingan 3 (tiga) tahun terakhir capaian mutu SNP jenjang SMP di 10 kabupaten/kota yang ada di provinsi Bengkulu, ada indikasi kenaikan dan penurunan capaian yang signifikan dari setiap kategori, Bila dilihat dari jumlah sekolahnya dapat digambarkan dalam grafik berikut ini:



Grafik 2. Perbandingan Jumlah sekolah Capaian SNP Satuan Pendidikan SMP Provinsi Bengkulu tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

Secara umum capaian mutu SNP jenjang SMP di 10 kabupaten/kota pada tahun 2018 meningkat dari 2 (dua) tahun sebelumnya, umumnya sudah menuju SNP 4 terdapat 222 sekolah atau sebesar 62,01 dari 358 Sekolah yang diolah data mutunya di provinsi Bengkulu. Sementara itu 110 Sekolah atau sebesar 30,73 sekolah capaian SNP nya menuju SNP 3, 23 sekolah atau sebesar 6,46 sekolah capaian SNP nya menuju SNP 2 sementara masih ada sekolah yang capain mutu nya “menuju SNP level 1” yaitu 3 sekolah atau 0,84. Dari SMP yang ada di Provinsi Bengkulu belum ada sekolah yang capaian memenuhi SNP.

JENJANG SMA

Gambaran Umum Capaian SNP Dari 136 SMA yang dipetakan mutunya. Peta capaian mutu jenjang SMA 3 (tiga) tahun terakhir (2016, 2017, 2018) di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Peta capaian mutu jenjang SMA 3 (tiga) tahun terakhir (2016, 2017, 2018)

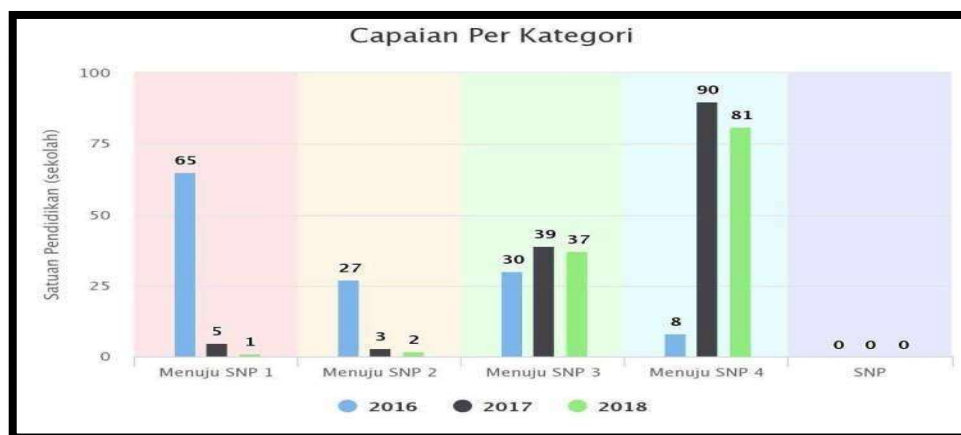
Capaian SNP			
Category	2016	2017	2018
Standar Kompetensi Lulusan	5.17	5.79	6.21
Standar Isi	4.54	4.92	4.92
Standar Proses	4.69	6.11	6.11
Standar Penilaian Pendidikan	3.8	5.64	5.65
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.59	4.14	3.62
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.8	4.32	5.31
Standar Pengelolaan Pendidikan	4.25	5.38	4.83
Standar Pembiayaan	3.72	5.52	5.76

Sumber: *pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id*

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian SNP tahun 2018 jenjang SMA hanya pada standar Pengelolaan dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sementara untuk standar yang lain terdapat kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya.

Bila dilihat dari jumlah sekolahnya dapat digambarkan dalam grafik berikut ini:

Grafik 3. Perbandingan Jumlah sekolah Capaian SNP Satuan Pendidikan SMA Provinsi Bengkulu tahun 2016, 2017 dan 2018



Secara umum capaian mutu SNP jenjang SMA di 10 kabupaten/kota yang ada di provinsi Bengkulu pada tahun 2018 meningkat dari 2 (dua) tahun sebelumnya, umumnya sudah "menuju SNP 4" terdapat 81 sekolah atau sebesar 66,94 % dari 121 Sekolah yang diolah data mutunya di provinsi Bengkulu. Sementara itu 37 Sekolah atau sebesar 30,58 % sekolah capaian SNP nya "menuju SNP 3", 2 sekolah atau sebesar 1,65 % sekolah capaian SNP nya "menuju SNP 2" sementara masih ada sekolah yang capain mutu nya "menuju SNP level 1" yaitu 1 sekolah atau 0,83 %. Dari SMA yang ada di Provinsi Bengkulu belum ada sekolah yang capaian mutunya memenuhi SNP.

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Tabel 5. Angka Partisipasi Sekolah (A P S) Provinsi Bengkulu

Usia 7-12			Usia 13-15			Usia 16-18		Usia 19-24			
2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
99.70	99.80	99.87	96.96	97.20	97.36	78.37	79.07	79.33	28.93	29.90	29.15

Sumber: BPS RI

C. Isu Strategis

- Pembelajaran di masa pandemi covid 19.

Di masa pandemi covid 19, menyebabkan pola pembelajaran berubah dari belajar dengan tatap muka secara langsung beralih ke pola belajar dengan tatap muka melalui jaringan. Sehingga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan peraturan baru tentang kurikulum di masa pandemi covid 19 ini. Untuk mensosialisasikan peraturan tersebut, maka BPMP Provinsi Bengkulu berkewajiban untuk memberikan informasi tersebut ke Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Provinsi Bengkulu.

- Peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Bengkulu.

Proses peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Bengkulu merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu BPMP Provinsi Bengkulu akan memfasilitasi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan penjaminan mutu pendidikan Provinsi Bengkulu. Kegiatan atau fasilitas yang dapat diberikan oleh BPMP Provinsi Bengkulu adalah :

- Pemetaan mutu pendidikan.
- Analisis peta mutu.
- Supervisi ke satuan pendidikan.
- Validasi data pokok pendidikan.
- Kebijakan prioritas lain yang ditentukan oleh kementerian.

D. Potensi dan Permasalahan

Menyikapi kondisi dan permasalahan pendidikan yang terdapat di Provinsi Bengkulu, maka BPMP Provinsi Bengkulu melakukan strategi peningkatan mutu pendidikan dengan cara melakukan analisis SWOT. Berikut analisis SWOT BPMP Provinsi Bengkulu sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Bengkulu.

Tabel 6. Analisis SWOT BPMP Provinsi Bengkulu

NO	KEKUATAN	KELEMAHAN	KESEMPATAN/PELUANG	ANCAMAN
1	Potensi SDM BPMP Provinsi Bengkulu - BPMP mempunyai tenaga fungsional Widyaprada dan staf yang berkompetensi dalam penjaminan mutu pendidikan	Jumlah SDM BPMP tidak seimbang dengan jumlah satuan pendidikan yang akan difasilitasi	A. BPMP melakukan kerjasama dengan BAN, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi dalam memfasilitasi satuan pendidikan B. Mengembangkan program supervise mutu pendidikan pendidikan seperti adanya aplikasi supervisi mutu pendidikan	Fasilitasi tidak dapat berjalan optimal
2	Sarana dan Prasarana ◆ Memiliki ruang kelas, asrama, laboratorium, perpustakaan, dan aula tempat pertemuan ◆ Memiliki jaringan internet ◆ Memiliki ULT sebagai pusat informasi	Layanan fasilitas Online belum diimplementasikan dengan optimal	✓ BPMP Provinsi Bengkulu dapat memfasilitasi stakeholder untuk pelaksanaan pelatihan dll ✓ BPMP Provinsi Bengkulu dapat memfasilitasi pelatihan/Pembelajaran Jarak Jauh ✓ Mengembangkan layanan fasilitas online di ULT BPMP Provinsi Bengkulu	Satuan pendidikan yang berada di daerah terpencil/jauh tidak dapat terpantau atau terlayani
3	BPMP sebagai UPT Pusat di bawah Kemdikbud	Asselon BPMP setingkat lebih rendah dari asselon yang terdapat di Kabupaten Kota/Provinsi	Meningkatkan potensi Sumber daya BPMP Provinsi Bengkulu sehingga Memudahkan BPMP untuk berkoordinasi dan melakukan kemitraan dengan stakeholder terkait peningkatan mutu pendidikan	Kurangnya kepercayaan dari easselon Yang lebih tinggi

Selanjutnya, untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen juga menerapkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mencakup delapan area, yakni manajemen perubahan, penataan peraturan perundangan/deregulasi kebijakan, penataan organisasi/kelembagaan, penataan tatalaksana, sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, pengawasan, serta pelayanan publik.

Salah satu potensi untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi dan layanan publik Kemendikbudristek dapat dilakukan dengan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi tata kelola, seperti: otomatisasi persuratan, pengadaan barang dan jasa, dan proses kepegawaian, serta penguatan layanan publik melalui Unit Layanan Teknis (ULT) untuk mengkomodasi layanan informasi dan pengaduan.

Selain Indeks Reformasi Birokrasi, tingkat capaian reformasi birokrasi juga didukung dengan bertambahnya unit kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI/WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sampai dengan tahun 2021, terdapat 18 Satker dengan predikat ZI-WBK pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Capaian itu tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu (1) sosialisasi dan fasilitasi terkait peningkatan delapan area perubahan kepada seluruh Satker serta pendampingan pembangunan ZI-WBK/WBBM, (2) fasilitasi pelayanan prima bagi petugas pemberi pelayanan publik, serta (3) penguatan agen perubahan melalui penyelenggaraan forum agen perubahan secara berkala, pelaksanaan rencana aksi agen perubahan di unit kerja terkait.

Sementara sebagai sistem pertanggungjawaban kinerja secara keseluruhan maka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga dilaksanakan mulai dari tingkat eselon 1, eselon 2, hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai pemenuhan akuntabilitas satuan kerja pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pada tahun anggaran berjalan.

Yang dimaksud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai komponen, alat, dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja yaitu perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan laporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja.

Tujuan dari pelaksanaan SAKIP adalah:

- Perencanaan lebih berorientasi kinerja dengan skenario evaluasi keberhasilan;
- Pelaporan lebih berorientasi pada hasil dan sesuai tanggung jawab pada tingkatan unit pelapor;
- Menyelaraskan dan pengintegrasian manajemen keuangan dan manajemen kinerja (penganggaran berbasis kinerja);
- Mendorong pimpinan melakukan monitoring dan pengendalian.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. Visi

Mengacu pada visi dan misi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, dan Menengah sebagai unit eselon I pembina BPMP Provinsi Bengkulu dan berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan. Adapun **Visi BPMP Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024** adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global di Provinsi Bengkulu”

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BPMP Provinsi Bengkulu kemudian menetapkan **Misi BPMP Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024** sebagai berikut:

- **Mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi di Provinsi Bengkulu.**
- **Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Bengkulu.**

BPMP Provinsi Bengkulu sebagai UPT dibawah Ditjen PAUD,Dikdas, dan Dikmen sebagai perlu menyusun arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan yang selaras. Oleh karena itu, dokumen Renstra menyajikan dua perspektif dalam pencapaiannya.

1. Perspektif Tujuan (Profil Pelajar Pancasila)

Profil Pelajar Pancasila sebagai elaborasi tujuan pendidikan nasional adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki

kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif seperti ditunjukkan oleh Gambar 16

Gambar 16: Dimensi-Dimensi Profil Pelajar Pancasila



Enam ciri tersebut menunjukkan bahwa Profil Pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif saja tetapi juga pada sikap dan perilaku yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia dan berkewargaan global

2. Perspektif Cara (Merdeka Belajar)

Bapak pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, menyatakan bahwa paradigma pendidikan yang memerdekakan memiliki 3 (tiga) ciri yaitu:

➤ Tidak Hidup Terperintah

Peserta didik belajar dengan kesadaran dari dalam diri sendiri, bukan karenapaksaan atau perintah orang lain.

➤ Berdiri Tegak karena Kekuatan Sendiri

Peserta didik berdiri tegak karena kekuatan sendiri dan mampu menemukan cara dalam mengatasi kesulitan belajar.

➤ Cakap Mengatur Hidupnya dengan Tertib

Peserta didik mampu menilai tindakan dan kemajuan belajarnya sehingga dapat melakukan perbaikan untuk mencapai tujuan belajar.

Pada hakikatnya gagasan Ki Hadjar Dewantara yang kemudian disebut sebagai Merdeka Belajar, sejalan dengan konsep *self regulated learning* yang telah dikaji oleh beberapa ahli seperti Zimmerman; Boekaerts, Winne dan Hadwin, Pintrich; Efklides, serta Hadwin, Järvelä dan Miller (Panadero, 2017). *Self regulated learning* adalah keyakinan seseorang terhadap kapasitas dirinya dalam menentukan tindakan, pikiran dan perasaan yang mengarah pada pencapaian tujuan, sembari melakukan monitoring diri dan refleksi diri terhadap kemajuan dalam mencapai target.

Merdeka belajar menjadi semangat yang menjiwai keseluruhan arah kebijakan dan strategi bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Semangat merdeka belajar berarti menekankan murid, guru, orang tua, satuan pendidikan, daerah, komunitas pendidikan, yayasan pendidikan, dunia usaha, dan dunia industri serta pelaku pendidikan lainnya sebagai aktor yang otonom dan berdaya. Pelaku pendidikan berdaya mengembangkan praktik-praktik baik pembelajaran, manajemen pendidikan, dan kepemimpinan pendidikan yang perlu diperkuat dan ditularkan ke seluruh ekosistem pendidikan sehingga membentuk pembelajaran yang berkualitas.

Semangat merdeka belajar, membentuk lima pergeseran paradigma dalam kepemimpinan dan pengelolaan pendidikan, yaitu sebagai berikut:

- 1) **Semula mekanisme kontrol menjadi pemberdayaan melalui umpan balik.**
Mekanisme kontrol terbukti tidak selalu efektif serta dapat menimbulkan tekanan dan orientasi yang keliru. Dalam ekosistem yang berdampak, umpan balik yang berkelanjutan menjadikan semua pihak lebih berdaya.
- 2) **Semula arahan menjadi penguatan praktik baik di lapangan.**
Kepemimpinan pendidikan dengan semangat merdeka belajar tidak menjadikan instruksi sebagai satu-satunya bentuk komunikasi, akan tetapi kepemimpinan yang mendengarkan, memahami, dan mengenali praktik baik di

lapangan. Upaya penguatan praktik baik akan menumbuhkan kepercayaan diri dan inisiatif pelaku pendidikan melakukan inovasi pembelajaran dan pendidikan.

3) **Semula apresiasi hanya bagi yang terbaik menjadi bagi semua kemajuan.**

Apresiasi hanya bagi yang terbaik dapat menimbulkan demotivasi bagi mereka yang merasa tidak berdaya. Semangat merdeka belajar mendorong pengelolaan pendidikan yang mengapresiasi semua kemajuan yang terjadi, bahkan untuk kemajuan kecil oleh satuan pendidikan kecil yang masih berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan semangat merdeka belajar ini, pelaku dalam ekosistem pendidikan akan lebih aktif dan lebih merasa berdaya, di manapun posisinya saat ini.

4) **Semula kompetisi menjadi kolaborasi untuk kemajuan bersama.**

Semangat merdeka belajar tanpa meninggalkan kompetisi, tapi lebih menonjolkan nilai-nilai gotong royong dalam bentuk kolaborasi antarpihak. Dengan kolaborasi, akan lebih banyak energi dan dukungan bagi semua pelaku untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab satu dua pihak tapi tanggung jawab bersama demi masa depan anak bangsa.

5) **Semula berfokus pada peningkatan akses menjadi peningkatan kualitas dan keadilan pendidikan.** Semangat merdeka belajar memperluas fokus pembangunan pendidikan pada peningkatan kualitas dan keadilan pendidikan. Hal ini mendorong lebih banyak kebijakan afirmatif dan asimetris untuk memastikan semua anak mendapatkan pembelajaran yang berkualitas.

Semangat merdeka belajar pada akhirnya selaras dengan arah kebijakan nasional yang terkait dengan otonomi daerah, otonomi kampus, dan manajemen berbasis sekolah. Semangat merdeka belajar mendorong penguatan semua pihak untuk menjadi otonom sehingga bisa mencapai tujuan pendidikan nasional dengan berpijak pada konteks satuan pendidikan dan daerah masing-masing

B. Misi

Misi BPMP Provinsi Bengkulu adalah:

1. Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
2. Melaksanakan pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
3. Melaksanakan pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
4. Melaksanakan pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
5. Melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan;
7. Melaksanakan urusan administrasi dengan menerapkan prinsip reformasi birokrasi.

C. Tujuan Strategis

Dalam upaya mencapai visi dan misi, BPMP Provinsi Bengkulu merumuskan tujuan strategis tahun 2020 – 2024, yaitu:

1. Meningkatkan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas di Provinsi Bengkulu.
2. Penguatan sistem tata kelola BPMP Provinsi Bengkulu yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Tujuan Strategis pertama (TS1) Meningkatkan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas melalui peningkatan Capaian delapan Standar

Nasional Pendidikan (SNP) di Provinsi Bengkulu ini mendukung pelaksanaan misi:

1. Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
2. Melaksanakan pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
3. Melaksanakan pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
4. Melaksanakan pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
5. Melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan;

Tujuan Strategis kedua (TS2) Penguatan sistem tata kelola BPMP Provinsi Bengkulu yang partisipatif, transparan, dan akuntabel ini mendukung pelaksanaan misi: (M7) Melaksanakan urusan administrasi dengan menerapkan prinsip reformasi birokrasi.

Berikut adalah indikator Tujuan Strategis yang akan dicapai tahun 2024.

Tabel 7. Indikator Tujuan Strategis

No	Tujuan Strategis	Indikator Tujuan	Target 2024
1	Meningkatkan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas di Provinsi Bengkulu	Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	35%
2	Penguatan sistem tata kelola BPMP Provinsi Bengkulu yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPMP Provinsi Bengkulu	A

D. Sasaran Strategis

Upaya merealisasikan tujuan strategis maka ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut.

1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas di Provinsi Bengkulu;
2. Menguatnya sistem tata kelola BPMP Provinsi Bengkulu yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Sasaran strategis pertama (SS-1) Meningkatnya penjaminan mutu Pendidikan di seluruh jenjang Pendidikan merupakan sasaran atas pelaksanaan tujuan strategis pertama (TS-1). Sasaran strategis kedua (SS-2) Terwujudnya tata kelola BPMP Provinsi yang baik merupakan sasaran atas pelaksanaan tujuan strategis kedua (TS-2).

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian dua sasaran ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 8. Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2020-2021

(SS-1) –Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	
KODE	Indikator Kinerja Kegiatan
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki indeks capaian Siswa minimal 75
IKK 1.2	Persentase kesenjangan hasil AKM (Assesment Kompetensi Minimum) dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk maksimal 5%
IKK 1.3	Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan minimal 95%

(SS 2) Terwujudnya tata kelola BPMP Provinsi Bengkulu yang baik	
KODE	Indikator Kinerja Kegiatan
IKK 2.1	Predikat SAKIP BPMP Provinsi Bengkulu nilai BB
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL nilai 81

Tabel 7. Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2022-2024

(SS) Meningkatkan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	
Kode	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
IKK 1	Persentase Satuan Pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya minimal 0,98%
IKK 2	Persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) minimal 35%

(SS 2) Terwujudnya tata kelola BPMP Provinsi Bengkulu yang baik	
KODE	Indikator Kinerja Kegiatan
IKK 2.1	Predikat SAKIP BPMP Provinsi Bengkulu nilai A
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL nilai 85

E. Tata Nilai BPMP Provinsi Bengkulu

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang mendukungnya. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Religius

Pekerjaan menjadi suatu amanah dan ibadah, mempunyai moral dan etika, berbudi luhur, dan bermartabat.

2. Integritas

Konsisten dan teguh dalam melaksanakan pekerjaan serta menjunjung tinggi nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam tindakan, bersikap jujur dan mengemban kepercayaan dalam pekerjaan.

3. Profesional

Warga BPMP Provinsi Bengkulu bekerja berdasarkan keahlian yang professional.

4. Kondusif

Menjaga lingkungan budaya kerja yang sehat, tolong menolong, transparan, komunikatif, demokratis, kerjasama, berbagi ilmu dan persamaan persepsi.

5. Inovatif

Untuk menggapai cita-cita sebagai lembaga yang unggul, BPMP Provinsi Bengkulu terus menciptakan inovasi penjaminan mutu pendidikan baik dalam kaitannya dengan pemetaan mutu, supervisi mutu, peningkatan mutu, pengembangan model penjaminan mutu, pengelolaan sistem informasi, kemitraan dan tindakan manajemen serta dukungan teknis lainnya.

6. Kolaborasi

Membangun kemitraan dan kerja sama yang baik antar sesama warga BPMP Provinsi Bengkulu dan stakeholder pendidikan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi

BPMP Provinsi Bengkulu sebagai unit vertikal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, mendukung kebijakan kementerian dalam mengemban amanat pembangunan sumber daya manusia untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Bengkulu yang termaktub dalam Visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2020-2024, yaitu :

“Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, gotong royong dan berkebhinekaan global”

Visi tersebut kemudian dirumuskan kedalam arah kebijakan dan strategi pendidikan Kemdikbud tahun 2020-2024 yaitu mendukung upaya pencapaian nawacita kedua dari sembilan Agenda Prioritas Pembangunan melalui Kebijakan Merdeka Belajar dengan tujuan menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi rakyat Indonesia dengan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Kondisi tersebut nantinya akan ditunjukkan melalui tingginya angka partisipasi diseluruh jenjang pendidikan, output pembelajaran yang berkualitas, serta kualitas pendidikan yang merata, tidak hanya secara geografis namun juga dari sisi status sosial ekonomi.

Secara lebih detail, Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan: keluarga, guru, lembaga pendidikan, DU/DI, dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam gambar berikut :



Sumber: Peta Jalan Pendidikan Indonesia, 2020

Gambar 3.1. Kebijakan Merdeka Belajar

Perubahan yang ingin dihadirkan oleh Kebijakan Merdeka Belajar diharapkan terjadi pada kategori ekosistem pendidikan, guru, pedagogi, kurikulum, dan sistem penilaian. Sebagai jiwa dari kebijakan Kemendikbud selama 2020-2024, Kebijakan Merdeka Belajar terwujud dalam segala arah kebijakan dan strategi Kemdikbud. Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi Kemdikbud untuk periode 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan
2. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan
3. Peningkatan Relevansi Pendidikan
4. Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter
5. Penguatan Tata Kelola Pendidikan

Visi, arah kebijakan dan strategi Kemendikbud di atas dirumuskan ke dalam Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 dan kemudian dituangkan dalam Permendikbud No. 22 Tahun 2020 dengan rincian kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing;

3. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter;
4. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia;
5. Peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas.

Berdasarkan rincian tersebut serta memperhatikan tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan sebagaimana tertuang di dalam Permendikbud 17 tahun 2020, BPMP Provinsi Bengkulu merancang strategi dalam mendukung pencapaian butir pertama kebijakan kementerian yang dapat dijelaskan pada matrik dibawah ini:

Tabel 9. Matrik Arah Kebijakan dan Strategi Kemdikbudristek.

Arah Kebijakan	Strategi Kemdikbud	Strategi BPMP	Program dan Kegiatan Prioritas
Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	1. Penguatan penjaminan mutu Pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah	1. Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Provinsi 2. Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar menengah di provinsi	1. Penyusunan Peta Mutu dan Pengolahan Data Mutu 2. Pendampingan Program Sekolah Penggerak 3. Sosialisasi Program Literasi dan Numerasi 4. Sosialisasi PTM dan PHBS
		3. Mensupervisi dan memfasilitasi pencapaian SNP pada satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi 4. Melaksanakan kerjasama yang erat dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait penjaminan mutu pendidikan	5. Pendampingan Pelaksanaan Assesmen Nasional 6. Pendampingan Program Literasi 7. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPDB 8. Perencanaan Berbasis Data 9. Pendampingan Implementasi Kurikulum Merdeka 10. Pemanfaatan Platform Rapor Pendidikan 11. Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar 12. Kemitraan dan Kerjasama berdasarkan Profil Pendidikan 13. Pendampingan pelaksanaan DAK
	2. Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas Pemanfaatan anggaran pendidikan	1. Meningkatkan tata kelola lembaga yang efektif, transparan, akuntabel serta pelibatan publik dalam peningkatan mutu layanan pendidikan di Provinsi	1. Peningkatan kualitas layanan 2. Peningkatan Pengelolaan SPBE 3. Penerapan SAKIP 4. Update Data Kepegawaian 5. Capacity Building Penguatan Kompetensi SDM 6. Penguatan Pengawasan 7. Internalisasi dan Percepatan Pencapaian Z-WBK

B. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi diperlukan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta memastikan kesesuaian arah

kebijakan, strategi dan sasaran tahun 2020-2024. Beberapa peraturan yang menjadi kerangka regulasi BPMP Provinsi Bengkulu tahun 2020 s.d. 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan ini merupakan Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan ini merupakan Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan ini menjelaskan tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan pada jenjang pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam regulasi ini dijelaskan peran BPMP yang bertugas “membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan”.

BAB I Ketentuan Umum menerangkan bahwa:

- a. Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu;

- c. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan;

Tugas dan wewenang BPMP dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan adalah:

- a. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, supervisi, dan evaluasi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen;
- b. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayah kerjanya;
- c. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap SDM Pemerintah Daerah dalam pengembangan SPMI- Dikdasmen di wilayah kerjanya;
- d. menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota kepada Direktorat Jenderal berdasarkan pemetaan;
- e. menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota kepada Pemerintah provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota.

C. Kerangka Kelembagaan

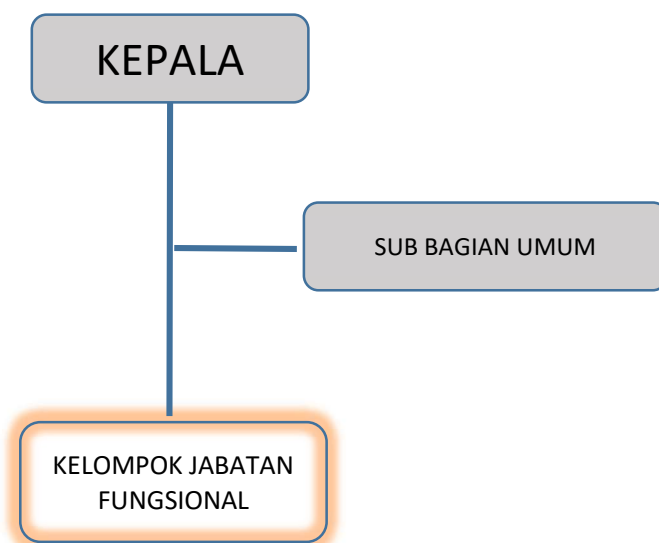
Kerangka kelembagaan Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, BPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya, BPMP memiliki fungsi:

1. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
2. Pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anakusia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;

3. Pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
4. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
5. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan
7. Pelaksanaan urusan administrasi.

Kerangka kelembagaan disusun berdasarkan Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Berikut Struktur organisasi BPMP Provinsi Bengkulu:

Bagan 1. Struktur Organisasi BPMP Provinsi Bengkulu



D. Reformasi Birokrasi

BPMP Provinsi Bengkulu Tahun 2020 mempersiapkan pembangunan ZI-WBK untuk mewujudkan tata kelola sesuai dengan tuntutan Reformasi Birokrasi menuju *good and clean government* dengan semangat Siap Menuju ZI-WBK.

a. Tata Nilai Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu

Dalam rangka mendukung pencapaian Renstra 2020-2024, Kemendikbud menetapkan tujuh tata nilai sebagai landasan sikap dan perilaku bagi seluruh pegawai Kemendikbud termasuk BPMP Provinsi Bengkulu. Tujuh tata nilai dimaksud adalah : Integritas, Kreatif dan Inovatif, Inisiatif, Pembelajar, Menjunjung Meritokrasi, Terlibat Aktif, dan Tanpa Pamrih.

b. Rencana Program Pembangunan ZI-WBK

Berdasarkan tujuan tersebut maka disusun rencana aksi untuk mendukung pencapaian tujuan dan target reformasi birokrasi khususnya dalam memperkuat area perubahan ZI-WBK, yaitu :

Tabel 10. Program Prioritas Pembangunan Zi-WBK BPMP Provinsi Bengkulu

No	Area Perubahan	Program Prioritas
1	Majemen Perubahan	Perubahan pola pikir pegawai melalui kegiatan agen perubahan
2	Penataan Tata Laksana	1. Inovasi POS Kegiatan Utama 2. Nilai SINDE 98-100 setiap bulan 3. Update Informasi publik secara mutakhir melalui website
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	1. Melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja 2. Membuat usulan mutasi pegawai antar jabatan sesuai peta jabatan 3. Melakukan monitoring dan evaluasi penempatan pegawai dengan rotasi dan dampak perbaikan kinerja lembaga 4. Pengembangan kompetensi pegawai secara merata berdasarkan hasil <i>training need analysis</i> 5. Pemberian <i>reward</i> kepada pegawai terbaik berdasarkan Hasil penilaian kinerja individu 6. Membuat Inovasi terkait Penerapan Aturan Disiplin/kode etik/kode perilaku 7. Data pegawai yang mutakhir melalui SIMPeg dan MySAK
4	Penguatan Akuntabilitas	1. Rapat Pelaksanaan Program oleh Pimpinan dan POKJA Kegiatan/Urusan 2. Nilai SAKIP A (85-95)
5	Penguatan Pengawasan	1. Melakukan <i>Public Campaign melalui banner dan media sosial secara berkala</i> 2. Tindaklanjut temuan auditor internal dan eksternal 100% 3. 100% pegawai melaporkan LKHASN/LHKPN
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Publikasi Standar Pelayanan dan makluman melalui banner, web dan media sosial 2. Penghargaan bagi petugas layanan terbaik 3. Adanya Inovasi Layanan yang mendekatkan kepada masyarakat 4. Terbentuknya media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! 5. 99% penilaian masyarakat terhadap layanan “Sangat Puas”/”Sangat Baik” 6. database pelayanan yang terintegrasi

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPMP Provinsi Bengkulu serta mendukung tercapainya kebijakan nasional sampai ke tingkat provinsi, BPMP Provinsi Bengkulu menetapkan 2 Sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan dari satu atau beberapa kegiatan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud, setiap sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

Tabel 11. Target Kinerja BPMP Provinsi Bengkulu tahun 2020-2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Sat.	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang Pendidikan	1.1	Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki indeks capaian siswa minimal 75	%	26,5	26,5	-	-	-
	1.2	Persentase Kesenjangan hasil AKM(Asseemen Kompetensi Minimum) dan Survey Karakter antar sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	%	5	5	-	-	-
	1.3	Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95	95	-	-	-
Terwujudnya tata kelola BPMP Provinsi yang baik	3.1	Predikat SAKIP BPMP Provinsi Bengkulu	Nilai	BB	BB	-	-	-
	3.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	Nilai	81	81	-	-	-

Tabel 12. Target Kinerja BPMP Provinsi Bengkulu tahun 2022-2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Sat.	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	2.1	Persentase Satuan Pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	-	-	0,98	0,98	0,98
	2.2	Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	-	-	25	30	35
Terwujudnya tata kelola BPMP Provinsi yang baik	3.1	Predikat SAKIP BPMP Provinsi Bengkulu	Nilai	BB	BB	A	A	A
	3.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	Nilai	81	81	82	83	85

B. Definisi Operasional dan Metode Pengukuran

Definisi Operasional dan Metode pengukuran indikator kinerja Definisi operasional dari setiap indicator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BPMP Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024 serta metode pengukuran dan penghitungan target pencapaian dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Target Kinerja BPMP Provinsi Bengkulu tahun 2022-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Metode Perhitungan
2020-2021			
Meningkatnya penjaminan Mutu pendidikan di seluruh jenjang Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki indeks capaian siswa minimal 75) SUMBER DATA : Berasal dari nilai kinerja sekolah laman	Pada tahun 2020 perhitungan masih menggunakan indeks mutu. Indeks mutu satuan pendidikan merupakan sistem perencanaan manajemen dan penilaian kinerja sekolah yang tersusun dalam empat perspektif (komponen), yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan,	Satuan= (persentase, %) Capaian Indeks mutu berdasarkan perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, 4 perspektif tersebut didapat dari pengisian laman

	penjaminan mutu pendidikan tahun sebelumnya. (pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id)	perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.	pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id Dengan sistem skor 19,0 – 34,2 sangat rendah 35,2 – 50,4 rendah 51,4 – 65,5 cukup 66,6 – 81,8 sangat tinggi 82,8 – 95,0 sempurna Satuan: % Tipe perhitungan: nonkumulatif
	Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk SUMBER DATA : Laporan Hasil Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum dan Laporan Hasil Survei Karakter	Asesmen Kompetensi Minimum adalah jenis asesmen yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengetahui kompetensi minimal siswa dalam bidang literasi, numerasi, dan sains. Kompetensi ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pendidikan di tingkat satuan pendidikan dan dalam rangka memberikan masukan kepada pihak yang terkait untuk melakukan intervensi pendidikan yang sesuai dengan kondisi sekolah. Target pelaksanaan AKM adalah seluruh satuan pendidikan di semua jenjang. Jumlah siswa yang nilainya mencapai standar minimal untuk survey karakter Survey dilakukan pada semua jenjang pendidikan. Survey karakter mengukur: 1) keterampilan sosialemosional-etis-spiritual, 2)kesejahteraan psikologis siswa dan guru, serta 3) praktik pengajaran/iklim belajar dan iklimsekolah Standar minimum yang bisa ditetapkan berdasarkan pertimbangan normatif dan praktis sesuai kondisi setiap sekolah atau daerah. <i>AKM baru akan dilaksanakan pada 2021, untuk target 2020 menggunakan Survei Karakter</i>	Satuan= (persentase, %) Selisih hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terburuk $\% = (S \text{ jumlah siswa yg mencapai nilai minimum AKM} + S \text{ jumlah siswa yg mencapai nilai minimum survey karakter}) / (S \text{ siswa yang mengikuti survey AKM} + S \text{ siswa yang mengikuti survey karakter}) \times 100\%$ Satuan: % Tipe perhitungan: non kumulatif

	Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan SUMBER DATA : Pusdatin yang berasal dari laporan laman dapodik online	Data pokok Pendidikan adalah system pendataan yang dikelola Kemendikbud yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring melalui laman dapodik Akurat bila data telah melalui tahap cleansing data (ganda, salah satuan, dsb), persentase diatas rata-rata 95% Berkelanjutan bila pendataan dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus menerus dengan persentase diatas rata-rata 95% Terbarukan bila pemutakhiran data dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%	1. akurat: $(\frac{\text{jumlah data akurat}}{\text{jumlah data}}) \times 100\%$ 2. berkelanjutan: $(\frac{\text{jumlah satupendidikan dengan data tahunan}}{\text{jumlah satupendidikan}}) \times 100\%$ 3. terbaru: $(\frac{\text{jumlah satupendidikan yang telah sinkdata}}{\text{jumlah satupendidikan}}) \times 100\%$ 4. $\sum (1+2+3)/3$ Satuan: % Tipe perhitungan: non kumulatif
2022-2024			
Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Persentase Satuan Pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	Persentase dari satuan pendidikan (PAUD Dikmas) di Provinsi Bengkulu yang memiliki mutu pembelajarannya meningkat dari tahun sebelumnya	$(\frac{\sum \text{satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang mutu pembelajarannya meningkat}}{\sum \text{satuan PAUD Dikmas di provinsi yang bersangkutan}}) \times 100\%$
	Persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya SUMBER DATA : https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id/app	Persentase dari provinsi/kabupaten/kota di wilayah masing-masing yang memiliki rapor pendidikan lebih tinggi dibandingkan rapor pendidikan tahun sebelumnya	$(\frac{\sum \text{satuan Dikdas dan Dikmen yang rapor pendidikannya meningkat}}{\sum \text{satuan Dikdas dan Dikmen pada provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan}}) \times 100\%$

2020-2024			
Terwujudnya tata kelola BPMP Provinsi yang baik	Nilai SAKIP BPMP Provinsi Provinsi Bengkulu	SAKIP adalah Rangkain sistematis dari berbagai komponen, alat dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja yaitu perencanaan, penetapan kinerja dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan laporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja	Satuan= Predikat, Predikat yang diterima oleh BPMP Provinsi Bengkulu yang dikeluarkan oleh TIM penilai SAKIP kementerian pendidikan dan kebudayaan
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL		

C. Kerangka Pendanaan

Pendanaan kegiatan penjaminan mutu pendidikan disusun mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku, kebijakan penjaminan mutu pendidikan, program pembangunan penjaminan mutu pendidikan dan sasarannya, serta implementasi program dalam dimensi ruang dan waktu. Dalam lima tahun ke depan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pendidikan akan menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, perlu disusun strategi pendanaan guna mengatasi keterbatasan tersebut. Dalam amanat Undang-undang Sisdiknas, dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, yang dikelola dengan menggunakan prinsip berkeadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada untuk mengupayakan optimalisasi penjaminan mutu pendidikan.

Tabel 14. Perkiraan Kebutuhan Anggaran Pencapaian Target Renstra BPMP Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		TARGET ANGGARAN (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang Pendidikan (2020-2021)	1.1	Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki indeks capaian siswa minimal 75	2.264.750	6.942.242	-	-	-
	1.2	Persentase kesenjangan hasil AKM (Assesment Kompetensi Minimum) dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	1.042.450	2.274.325	-	-	-
	1.3	Persentase Kab/Kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	837.308	1.538.484	-	-	-
Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen (2022-2024)	1.1	Persentase Satuan Pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	-	-	3.577.889	3.577.889	3.577.889
	1.2	Persentase Prov/Kab/Kota yang Meningkatkan rapor pendidikannya					
Terwujudnya tata kelola BPMP Provinsi yang baik (2020-2024)	2.1	Predikat SAKIP BPMP Provinsi Bengkulu	18.085.895	25.585.895	16.330.045	18.085.895	18.085.895
	2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL					

BAB V

PENUTUP

Renstra BPMP Provinsi Bengkulu merupakan arahan dasar yang dijabarkan secara operasional oleh masing-masing unit Bagian di dalamnya, sehingga kegiatan yang ingin dicapai nantinya dapat memenuhi misi program BPMP Provinsi Bengkulu. Renstra BPMP Provinsi Bengkulu ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan penyusunan program, penganggaran, monev dan penyediaan data dan pelaporan kepada publik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel, diharapkan penyelenggaraan program dapat memenuhi visi Kemendikbud yaitu “mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”.

Dengan demikian Renstra BPMP Provinsi Bengkulu ini tidak bersifat kaku dan selalu terbuka kemungkinan untuk selalu disempurnakan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa Renstra adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan sehingga bersifat adaptif terhadap lingkungan strategis yang senantiasa berubah.